

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wata'ala atas segala curahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2022 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Barat tahun 2022.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2022, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Muna Barat yang sejahtera dan lebih baik.

Laworo, 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat

TTD

R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196608041990031012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.3. Program dan Kegiatan	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Hal.
2.1.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Muna Barat	5
2.1.b	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 Kabupaten Muna Barat.....	12
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat	25
2.5	Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat.....	28
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.....	30
4.1	Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.....	32
4.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna barat.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Bappeda Kabupaten Muna Barat merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Muna Barat mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD tahun 2022 Kabupaten Muna Barat. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD 2022 berdasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
12. Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Bappeda Kabupaten Muna Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda yaitu:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2022
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi, yang terdiri dari : (1) evaluasi kebijakan perencanaan program dan kegiatan; (2) evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan; dan (3) evaluasi hasil rencana program dan kegiatan. Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2022, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Tabel 2.1.a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d tahun 2021 Kabupaten Muna Barat

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				5.149.137.109,00					
4	3	1	1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kantor yang tepat waktu	100 %	1.380.000	1.216.686.000	1.145.781.653	94,17	100	100	100
4	3	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Tahun	1.200.000				100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan Jasa telekomunikasi, listrik & air	1 Tahun	254.700.000	20.000.000	15.668.800	78,34	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dokumen Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	15.000.000	14.500.000	7.682.620	52,98	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pemberian honor bagi penyelenggara administrasi keuangan	1 Tahun	93.600.000	91.550.000	84.950.000	92,79	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	6.000.000	86.180.000	86.180.000	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	9	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan alat tulis kantor	1 Tahun	40.000.000	40.600.000	40.600.000	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1	1	10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan pencetakan dan penggandaan	1 Tahun	79.500.000	180.600.000	179.686.000	99,49	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan penerangan kantor	1 Tahun	25.000.000	4.600.000	4.600.000	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya 1 unit Komputer PC	1 Tahun	0	9.900.000	9.900.000	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	7.200.000	7.200.000	6.960.000	96,67	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	14	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan bahan makanan dan minuman	1 Tahun	133.900.000	67.512.500	67.512.500	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	530.500.000	487.043.500	487.041.733	100,00	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	1	16	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran dengan baik	1 Tahun	193.500.000	207.000.000	155.000.000	74,88	100	1 Tahun	1 Tahun
4	3	1	2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	100%	590.500.000	693.030.000	686.790.000	99,10	100	100	100
4	3	1	2	1	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	100%	100.000.000				100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	100%	0	40.000.000	38150000	95,38	100	100	100
4	3	1	2	3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terseainya Perlengkapan Kantor	100%	167.000.000				100	100	100
4	3	1	2	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	100%	215.215.000	221.650.000	220.770.000	99,60	100	100	100
4	3	1	2	5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100%	175.000.000	150.000.000	150.000.000	100,00	100	100	100
4	3	1	2	6	Pemeliharaan/Penataan Lingkungan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100%	33.500.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100	100	100
4	3	1	2	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terehabilitasinya Gedung kantor	100%	200.000.000	200.000.000	196.490.000	98,25	100	100	100
4	1	3			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase	100%	9.000.000				100	100	100
4	1	3	1		Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Tersedianya Mesin / Kartu Absensi	100%	9.000.000				100	100	100
4	1	5			PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR		100%	270.000.000				100	100	100
4	1	5	1		Pendidikan dan Pelatihan Informal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Informal	100%	270.000.000				100	100	100
4	3	1	1	5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI		100%	275.000.000	501.500.000	200.040.000	39,89	100	100	100
4	3	1	1	5	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terlaksananya pengisian format SIPD	100%		100.000.000	99.650.000	99,65	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1	1	5	Penyusunan Aplikasi (Updating) Database Pembangunan Berbasis GIS	Terlaksananya pemutakhiran database pembangunan yang berbasis GIS	100%	150.000.000	100.000.000	98.890.000	98,89	100	100	100
4	3	1	1	5	Pemetaan Potensi Persawahan Berbasis Citra Satelit	Tersedianya Peta Potensi Persawahan Berbasis Citra Satelit	100%	125.000.000				100	100	100
4	3	1	1	5	Pembangunan dan Pemutakhiran Unsur Peta Dasar Kabupaten Muna Barat Berbasis Citra Satelit	Tersedianya Peta Dasar Kabupaten Muna Barat	100%		1.500.000	1.500.000	100,00	100	100	100
4	3	1	1	5	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat	100%		300.000.000		0,00	100	100	100
4	3	1	8		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencana	100%	350.000.000	75.000.000	74.761.000	99,68	100	100	100
4	3	1	8	1	Peningkatan Kemampuan Tekhnis Aparatur Perencana		100%	100.000.000				100	100	100
4	3	1	8	4	Pembentukan Pokja Pelaporan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan	Jenis laporan yang dibuat	100%	250.000.000	75.000.000	74.761.000	99,68	100	100	100
4	3	1	9		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Daerah yang Tersedia	100%	2.226.400.000	1.130.721.500	1130388820	99,97	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1	9		Penyusunan Rancangan Awal RKPD *	Tersusunnya rancangan awal RKPD tahun 2020	100%	85.000.000	75.000.000	75.000.000	100,00	100	100	100
4	3	1	9		Penyelenggaraan musrenbang RKPD dan Penetapan RKPD *	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020	100%	321.400.000	206.346.500	206.346.500	100,00	100	100	100
4	3	1	9		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		100%	35.000.000				100	100	100
4	3	1	9		Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan PPA *	Tersedianya dokumen Perubahan KUA dan PPA Tahun 2020	100%	85.000.000	46.500.000	46.498.500	100,00	100	100	100
4	3	1	9		Penyusunan Dokumen KUA dan PPA *	Tersedianya dokumen KUA dan PPA Tahun 2020	100%	95.000.000	46.500.000	46.450.450	99,89	100	100	100
4	3	1	9		Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan *	Teridentifikasinya program dan kegiatan prioritas daerah	100%	60.000.000	38.000.000	38.000.000	100,00	100	100	100
4	3	1	9		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah *	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah	100%	550.000.000	497.375.000	497.333.820	99,99	100	100	100
4	3	1	9		Penyusunan RKPD Perubahan *	Tersusunnya RKPD Perubahan 2020	100%	70.000.000	46.000.000	45.760.000	99,48	100	100	100
4	3	1	9		Penyusunan LKPJ Bupati Muna Barat*	Tersusunnya LKPJ Bupati Muna Barat	100%	200.000.000	175.000.000	175.000.000	100,00	100	100	100
4	3	1	9		Penyusunan ASB Konstruksi	Tersusunnya ASB Konstruksi	100%	250.000.000				100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	1			Penyusunan Revisi RPJMD	Tersusunya Revisi RPJMD	100%	450.000.000				100	100	100
4	3	1			Percetakan dan Pengadaan RTRW serta dokumen teknis Pendukung	Tersedianya Percetakan dan Pengadaan RTRW serta Dokumen Tekhnis Pendukung	100%	25.000.000				100	100	100
4	3	2			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Meningkatkan Pembangunan Sektor Ekonomi	100%	70.000.000	100.000.000	98.868.000	98,87	100	100	100
4	3	2			Verifikasi dan Identifikasi (Updating) Warga Miskin berbasis GIS	Tersedianya Database Masyarakat miskin yang Up To Date	100%	70.000.000	100.000.000	98.868.000	98,87	100	100	100
4	3	2			PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100%	225.000.000	350.000.000	348.200.000	99,49	100	100	100
4	3	2	2		Koordinasi dan Pengendalian Program Pansimas	Terlaksananya Kordinasi dan Pengendalian Program Pansimas	100%	75.000.000				100	100	100
4	3	2	2		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten	Tersusunya Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten	100%	150.000.000				100	100	100
4	3	2	2		Penyusunan Rencana Induk Penyediaan Air Minum	Tersusunya Rencana Induk Penyediaan Air Minum	100%		350.000.000	348.200.000	99,49	100	100	100
4	3	2			PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	100%	380.000.000	150.000.000	149.757.500	99,84	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Autcomes) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2020	Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2020 (Rp)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun Berjalan 2020	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Targer Capaian Program & Kegiatan (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	2	6		Visualisasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Visualisasi dan Dokumentasi Pembangunan Daerah	100%	80.000.000				100	100	100
4	3	2	6		Penyusunan Revisi KLHS RPJMD	Tersusunya Revisi KLHS RPJMD	100%	300.000.000				100	100	100
4	3	2	6		Kajian Peningkatan Produksi Kacang Tanah Lokal	Terlaksananya Kajian Produksi Kacang Tanah	100%		150.000.000	149.757.500	99,84	100	100	100

**Tabel 2.1.b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2021 Kabupaten Muna Barat**

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja	Target Capaian Kinerja APBD		Target Kinerja	Refocussing Kegiatan		Target Kinerja	Perubahan	
								Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2021	
								Per Kegiatan	Per Sub Kegiatan		Per Kegiatan	Per Sub Kegiatan		Per Kegiatan	Per Sub Kegiatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(7)	(8)	(9)
05	01				PERENCANAAN			5.315.097.269	5.315.097.269		5.523.662.195	5.523.662.195		5.523.662.195	5.523.662.195
05	01				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.315.097.269	5.315.097.269		5.523.662.195	5.523.662.195		5.523.662.195	5.523.662.195
05	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan		3.928.203.179	3.928.203.179		3.973.684.645	3.973.684.645		3.973.684.645	3.973.684.645
05	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		22.998.230	22.998.230		22.998.230	22.998.230		22.998.230	22.998.230
05	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia :	2 Dok	2.999.780	2.999.780	2 Dok	2.999.780	2.999.780	2 Dok	2.999.780	2.999.780
05	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740
05	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740

05	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740
05	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740	3 Kali dan 4 Dok	2.999.740	2.999.740
05	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	3 Kali dan 4 Dok	4.999.570	4.999.570	3 Kali dan 4 Dok	4.999.570	4.999.570	3 Kali dan 4 Dok	4.999.570	4.999.570
05	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	4 Kali	2.999.920	2.999.920	4 Kali	2.999.920	2.999.920	4 Kali	2.999.920	2.999.920
05	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD yang disampaikan tepat waktu		1.086.103.850	1.086.103.850		1.111.301.850	1.111.301.850		1.111.301.850	1.111.301.850
05	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	14 Orang	958.000.000	958.000.000	14 Orang	983.198.000	983.198.000	14 Orang	983.198.000	983.198.000
05	01	01	2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang menyampaikan laporan kinerja individu	... %	-	-	... %	-	-	... %	-	-
05	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD	1 kegiatan	103.104.775	103.104.775	1 kegiatan	103.104.775	103.104.775	1 kegiatan	103.104.775	103.104.775
05	01	01	2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	8 Kali	4.999.770	4.999.770	8 Kali	4.999.770	4.999.770	8 Kali	4.999.770	4.999.770

05	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	4 Kali dan 4 Dok	4.999.770	4.999.770	4 Kali dan 4 Dok	4.999.770	4.999.770	4 Kali dan 4 Dok	4.999.770	4.999.770
05	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase temuan yang ditanggapi	100%	4.999.770	4.999.770	100%	4.999.770	4.999.770	100%	4.999.770	4.999.770
05	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	18 Kali dan 32 Dok	4.999.770	4.999.770	18 Kali dan 32 Dok	4.999.770	4.999.770	18 Kali dan 32 Dok	4.999.770	4.999.770
05	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	2 Dok	4.999.995	4.999.995	2 Dok	4.999.995	4.999.995	2 Dok	4.999.995	4.999.995
05	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik		2.999.870	2.999.870		2.999.870	2.999.870		2.999.870	2.999.870
05	01	01	2	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen barang milik OPD yang tertata dengan baik	2 Dok	2.999.870	2.999.870	2 Dok	2.999.870	2.999.870	2 Dok	2.999.870	2.999.870
05	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik		695.899.800	695.899.800		695.899.800	695.899.800		695.899.800	695.899.800
05	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	16 Orang	195.900.000	195.900.000	16 Orang	195.900.000	195.900.000	16 Orang	195.900.000	195.900.000

05	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan-Undangan	15 Orang	499.999.800	499.999.800	15 Orang	499.999.800	499.999.800	15 Orang	499.999.800	499.999.800
05	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan		868.552.485	868.552.485		952.504.485	952.504.485		952.504.485	952.504.485
05	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Paket	4.999.300	4.999.300	1 Paket	4.999.300	4.999.300	1 Paket	4.999.300	4.999.300
05	01	01	2,1	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia :	1 Paket	17.633.900	17.633.900	1 Paket	17.633.900	17.633.900	1 Paket	17.633.900	17.633.900
05	01	01	2,1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia :	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-	1 Paket	-	-
05	01	01	2,1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia :	1 Paket	199.999.660	199.999.660	1 Paket	176.001.660	176.001.660	1 Paket	176.001.660	176.001.660
05	01	01	2,1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	98%	29.999.800	29.999.800	98%	29.999.800	29.999.800	98%	29.999.800	29.999.800
05	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Paket	7.200.000	7.200.000	1 Paket	7.200.000	7.200.000	1 Paket	7.200.000	7.200.000
05	01	01	2,1	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	1 Paket	49.999.825	49.999.825	1 Paket	49.999.825	49.999.825	1 Paket	49.999.825	49.999.825

05	01	01	2,1	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas kedatangan tamu	100%	1.290.000	1.290.000	100%	1.290.000	1.290.000	100%	1.290.000	1.290.000
05	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	50 Kali	557.430.000	557.430.000	50 Kali	665.380.000	665.380.000	50 Kali	665.380.000	665.380.000
05	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			819.586.200	819.586.200		860.159.000	860.159.000		860.159.000	860.159.000
05	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas operasional/ lapangan tersedia	3 Unit	654.500.000	654.500.000	2 Unit	654.500.000	654.500.000	2 Unit	654.500.000	654.500.000
05	01	01	2,1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah membel yang tersedia	1 Paket	14.461.200	14.461.200	1 Paket	14.461.200	14.461.200	1 Paket	14.461.200	14.461.200
05	01	01	2,1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang tersedia :	1 Paket	150.625.000	150.625.000	1 Paket	191.197.800	191.197.800	1 Paket	191.197.800	191.197.800
05	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia		375.302.654	375.302.654		255.561.320	255.561.320		255.561.320	255.561.320
05	01	01	2,1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan surat menyurat	100%	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	1.200.000	100%	1.200.000	1.200.000
05	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan	2 Rekening	227.241.334	227.241.334	2 Rekening	42.500.000	42.500.000	2 Rekening	42.500.000	42.500.000
05	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	2.000.000	2.000.000	100%	7.000.000	7.000.000	100%	7.000.000	7.000.000
05	01	01	2,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	144.861.320	144.861.320	... %	204.861.320	204.861.320	... %	204.861.320	204.861.320

05	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			56.760.090	56.760.090		72.260.090	72.260.090		72.260.090	72.260.090
05	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	13 Unit	36.895.290	36.895.290	13 Unit	52.395.290	52.395.290	13 Unit	52.395.290	52.395.290
05	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 Paket	19.864.800	19.864.800	1 Paket	19.864.800	19.864.800	1 Paket	19.864.800	19.864.800
05	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.056.900.550	1.056.900.550		1.110.699.150	1.110.699.150		1.110.699.150	1.110.699.150
05	01	02	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			489.998.475	489.998.475		543.797.075	543.797.075		543.797.075	543.797.075
05	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah OPD yang ikut kegiatan Forum SKPD/Lintas SKPD	40 SKPD	109.999.580	109.999.580	40 SKPD	109.999.580	109.999.580	40 SKPD	109.999.580	109.999.580
05	01	02	2	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Musrenbang Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Keg	199.999.870	199.999.870	1 Keg	253.798.470	253.798.470	1 Keg	253.798.470	253.798.470
05	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan Musrenbang Kecamatan yang disiapkan	11 Dok	29.999.275	29.999.275	11 Dok	29.999.275	29.999.275	11 Dok	29.999.275	29.999.275

05	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi koordinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dan ditetapkan	20 Kali 1 Dok	149.999.750	149.999.750	20 Kali 1 Dok	149.999.750	149.999.750	20 Kali 1 Dok	149.999.750	149.999.750
05	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			318.758.025	318.758.025		318.758.025	318.758.025		318.758.025	318.758.025
05	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	1 Dok	168.758.300	168.758.300	1 Dok	168.758.300	168.758.300	1 Dok	168.758.300	168.758.300
05	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Pembangunan yang dibuat	1 Aplikasi	149.999.725	149.999.725	1 Aplikasi	149.999.725	149.999.725	1 Aplikasi	149.999.725	149.999.725
05	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			248.144.050	248.144.050		248.144.050	248.144.050		248.144.050	248.144.050
05	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota	13 Kali	223.639.205	223.639.205	13 Kali	223.639.205	223.639.205	13 Kali	223.639.205	223.639.205

05	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Frekuensi Korodinasi yang dilakukan dalam rangka penyusunan laporan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah secara Berkala yang dihasilkan	4 Kali 4 Dok	24.504.845	24.504.845	4 Kali 4 Dok	24.504.845	24.504.845	4 Kali 4 Dok	24.504.845	24.504.845
05	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			329.993.540	329.993.540		439.278.400	439.278.400		439.278.400	439.278.400
05	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			109.997.880	109.997.880		137.446.550	137.446.550		137.446.550	137.446.550
05	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	1 Dok	24.999.880	24.999.880	1 Dok	52.448.550	52.448.550	1 Dok	52.448.550	52.448.550
05	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laoran Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990

						Pemerintahan yang diasistensi									
05	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770
05	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan Dokumen Laporan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	24.998.480	24.998.480	1 Dok	24.998.480	24.998.480	1 Dok	24.998.480	24.998.480
05	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990
05	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770

						Pembangunan Manusia									
05	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			109.996.480	109.996.480		136.943.230	136.943.230		136.943.230	136.943.230
05	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan Dokumen Laporan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Dok	24.998.480	24.998.480	1 Dok	24.998.480	24.998.480	1 Dok	24.998.480	24.998.480
05	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan yang diasistensi	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990
05	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770
05	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan Dokumen Laporan Pperencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 Dok	24.998.480	24.998.480	1 Dok	51.945.230	51.945.230	1 Dok	51.945.230	51.945.230

05	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yang diasistensi	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990
05	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang SDA	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770
05	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			109.999.180	109.999.180		164.888.620	164.888.620		164.888.620	164.888.620
05	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan Dokumen Laporan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 Dok	24.999.830	24.999.830	1 Dok	52.444.550	52.444.550,00	1 Dok	52.444.550	52.444.550,00
05	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990,00	1 Dok	19.999.990	19.999.990,00

05	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770,00	1 Dok	9.999.770	9.999.770,00
05	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi dan Dokumen Laporan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 Dok	24.999.830	24.999.830	1 Dok	52.444.550	52.444.550,00	1 Dok	52.444.550	52.444.550,00
05	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	1 Dok	19.999.990	19.999.990	1 Dok	19.999.990	19.999.990,00	1 Dok	19.999.990	19.999.990,00
05	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	1 Dok	9.999.770	9.999.770	1 Dok	9.999.770	9.999.770,00	1 Dok	9.999.770	9.999.770,00
05	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.012.499.813	1.012.499.813		487.499.813	487.499.813		487.499.813	487.499.813

05	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.349.999.750	1.349.999.750		649.999.750	649.999.750		649.999.750	649.999.750
05	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			350.000.000	350.000.000		350.000.000	350.000.000		350.000.000	350.000.000
05	05	02	2.01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen survei indeks kepuasan masyarakat	1 Paket	350.000.000	350.000.000	1 Paket	350.000.000	350.000.000,00	1 Paket	350.000.000	350.000.000,00
05	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			999.999.750	999.999.750		299.999.750	299.999.750		0	0
05	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan yang dimanfaatkan	1 Dok	149.999.800	149.999.800	1 Dok	149.999.800	149.999.800,00	1 Dok	149.999.800	149.999.800,00
05	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang dimanfaatkan	1 Dok	149.999.950	149.999.950	1 Dok	149.999.950	149.999.950,00	1 Dok	149.999.950	149.999.950,00
05	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dimanfaatkan	1 Dok	700.000.000	700.000.000	1 Dok	-	-	1 Dok	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat sampai dengan tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Muna Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke- (%)		Proyeksi Tahun Ke- (%)	
			2019	2020	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Penunjang Urusan Perencanaan								
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100	100	100	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	77	80	100	100
Penelitian dan pengembangan								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	75%	72%	75%	70	75	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	75%	72%	75%	70	75	100	100
3	Penerapan SIDA:							
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	75%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	75%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meskipun telah dicapai kemajuan di berbagai bidang pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat, permasalahan kedepannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan kegiatan dalam kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 menjadi tantangan

yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat yang optimal. Perencanaan program dan kegiatan tahun 2022 mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 maupun isu-isu strategis terkini yang harus ditangani secara baik. Adapun Isu-isu strategis yang dimaksud antara lain:

1. Konsep Money Follow Program

Saat ini penganggaran menggunakan pendekatan Money Follow Function. Artinya dalam penyusunan anggaran, fungsi menjadi poros utama dalam alokasi anggaran. Hal ini dinilai menciptakan beberapa pemborosan dimana terdapat beberapa fungsi dalam pemerintahan yang tidak prioritas tetap mendapat alokasi anggaran. Skala Prioritas menjadi kabur dimana setiap lembaga pemerintahan mengajukan anggaran dan sulit untuk dilakukan filter karena argument dasarnya dalam alokasi anggaran adalah fungsi.

Pengalaman empiris itu selanjutnya dievaluasi dan membuahkan pendekatan penganggaran dengan prinsip “Money Follow Program”. Pendekatan “Money Follow Program” harus dipahami sebagai alokasi anggaran berdasarkan prioritas-prioritas pembangunan.

Pada penyusunan APBD yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Muna Barat berencana menggunakan pendekatan konsep Money Follow Program. Tentunya perubahan pendekatan harus pula dibarengi perubahan mind set penganggaran. Jika sebelumnya (menggunakan pendekatan “Money Follow Function”), filter pengalokasian anggaran adalah fungsi, Prioritas menjadi kata kunci utama dalam penganggaran “Money Follow Program”. Sehingga ke depan penganggaran lebih focus pada program dan kegiatan yang akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

2. Pengalihan urusan sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014

Tercapainya pemahaman dan persepsi yang sama pada tataran Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UU 23 Tahun 2014, dimana konsekuensi perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, yang akan berdampak pada peralihan penanganan pada beberapa sub-urusan.

3. Sinkronisasi terhadap visi misi kepala daerah terpilih

Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Daerah terpilih melalui tujuan-sasaran-strategi-kebijakan-program-kegiatan.

4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

Hal ini dapat terlihat dari Minimnya sarana dan prasana perangkat daerah dalam mendukung tugas-tugas aparatur perencana dan minimnya jumlah aparatur perencana yang memiliki kompetensi.

5. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan

Hal ini disebabkan karena belum optimalnya ketersediaan data/informasi tentang pembangunan daerah yang up to date, dan minimnya aparat perencana perangkat daerah lingkup Kab. Muna Barat yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil Litbang dalam perencanaan dan pembangunan Daerah

Hal ini diakibatkan karena belum optimalnya hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 yang terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Penyusunan RKPD ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi

Sulawesi Tenggara. RKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2022 menjadi satu-satunya bahan rujukan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan langsung kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tetapi kepada perangkat daerah terkait. Usulan yang disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Muna Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi bahan telaahan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 adalah:

a. RPJMN

Penyusunan Renja Bappeda mengacu pada Renstra Bappeda dan RPJMD dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja kunci yang perlu direncanakan dan dilaksanakan per tahunnya.

b. Rencana Kerja Pemerintah

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang adadi RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah.

c. Komitmen Nasional

Upaya lebih menyejahterakan masyarakat melalui percepatan 8 (delapan) tujuan (goals) yang mencakup:

- 1) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan;
- 2) Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua;
- 3) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Menurunkan Angka Kematian Anak;
- 5) Meningkatkan Kesehatan Ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
- 7) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- 8) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

d. RTRW

Perlunya perencanaan berpedoman pada aspek ruang dan lokasi karena aspek tersebut mengarahkan seluruh dinamika pemangku kepentingan terhadap keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan. Semua aspek keruangan pada dokumen perencanaan termasuk Renja harus berpedoman pada RTRW

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muna Barat mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolak ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, maka Tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke -					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100
			Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk bahan perencanaan	65	70	72	73	75	75
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	N.A	B	B	BB	BB	A

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bappeda Kabupaten Muna Barat mempunyai 4 program dan 15 kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kabupaten Muna Barat yaitu:

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

**c. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

d. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Muna Barat diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Bappeda Kabupaten Muna Barat Tahun 2022 diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat seperti pada Tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

Tujuan	Sasaran	Program
Mengoptimalkan kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna barat

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana (Rp)
5	1				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Indeks Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan		5,510,949,900
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	% Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	100%	4,196,069,650
5	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B	232,242,000
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Dokumen Perencanaan yang tersedia :	4 Dokumen	210,370,000
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen RKA-OPD	5 Dokumen	3,280,000
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-OPD	5 Dokumen	3,280,000
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan Dokumen DPA-OPD	5 Dokumen	3,280,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-OPD	5 Dokumen	3,280,000
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen lakip OPD yang disampaikan tepat waktu	5 Dokumen	5,452,000
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah rapat evaluasi kinerja internal OPD	5 Laporan	3,300,000
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keberadaan Laporan Keuangan OPD Yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	1,417,739,828
5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang penerima gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.	16 Orang	1,256,031,828
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan dan verifikasi keuangan OPD	5 Dokumen	101,400,000
5	1	1	2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi OPD	5 Dokumen	5,960,000
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	5 Laporan	5,360,000
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase temuan yang ditanggapi	5 Dokumen	34,688,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan ketersediaan dokumen Laporan Keuangan Berkala OPD	5 Laporan	8,800,000
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis yang disampaikan tepat waktu	5 Laporan	5,500,000
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan teregister dengan baik	100%	5,000,000
5	1	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5,000,000
5	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bahan administrasi ASN yang tercatat dengan baik	100	369,108,000
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya	16 Orang	314,108,000
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	55,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan bahan dan jasa pendukung kelacaran penyelenggaraan urusan pendidikan	100%	1,285,245,462
5	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Paket	5,497,140
5	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia :	1 Paket	12,339,400
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia :	1 Paket	219,991,200
5	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan bahan cetakan dan penggandaan	98%	33,005,800
5	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	1 Paket	8,000,000
5	1	1	2.1	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah dan jenis Bahan / Material yang tersedia	1 Paket	56,573,922
5	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi kedatangan tamu	100%	1,750,000
5	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	948,088,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	563,746,000
5	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas operasional/ lapangan tersedia	2 Unit	563,746,000
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Penunjang urusan pemerintahan yang tersedia	100%	375.302.654
5	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan surat menyurat	100%	6,000,000
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Mbps yang dibayarkan	2 Rekening	13,200,000
5	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	240,000,000
5	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	63,788,360
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional / lapangan yang memperoleh pemeliharaan dan perpanjangan STNK	13 Unit	41,788,360

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis bangunan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan	1 Paket	22,000,000
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	814,685,400
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pendanaan yang selaras dan tepat waktu	100%	494,709,400
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	55,000,000
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	127,999,600
5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	219,808,000
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	22 Usulan	32,999,800

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	58,902,000
5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	165,000,000
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	1 Dok	0
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	165,000,000
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tersedianya dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	154,976,000
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	54,976,000
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	100,000,000

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
					Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dokumen Perencanaan OPD	100%	500,194,850
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	188,198,800
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	44,999,700
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	21,999,650
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	10,999,750

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	77,199,950
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	21,999,750
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	11,000,000
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	155,997,900
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	44,999,650

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	21,999,600
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	10,999,700
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	44,999,700
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	21,999,650
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian	1 Dok	10,999,600

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	155,998,150
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	44,999,650
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	21,999,650
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	10,999,700
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	44,999,750

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022	
							Target	Jumlah Dana
								(Rp)
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	3 Laporan	21,999,650
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Kewilayahan	3 Lapora	10,999,750
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Hasil-hasil Litbang dan kebijakan inovasi yang dimanfaatkan untuk perencanaan dan pembangunan daerah	100%	345,000,000
5	5	2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang dimanfaatkan dibidang Ekonomi dan Pembangunan	100%	345,000,000
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dok	165,000,000
5	5	2	2.03	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dok	180,000,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Akhirnya harapan kita semua Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2022 ini dapat diimplementasikan secara akuntabel dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Muna Barat.

Laworo, 2021
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muna Barat

TTD

R. DJAMUN SUNJOTO, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196608041990031012